

BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Organisasi Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim orde baru yang awalnya dimulai dari pembredelan Detik, Editor dan Tempo pada 21 Juni 1994. Melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 yang terdiri dari kurang lebih 100 Jurnalis menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers, menjaga kebebasan pers, meningkatkan kesejahteraan bagi jurnalis. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme plus kepatuhan pada etika tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain

dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kelima di Bogor, 17-20 oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal yang berhubungan dengan *International Federation of Journalists* (IFJ), organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta mengangkat dan memberhentikan anggota.

Aliansi Jurnalis Independen Semarang merupakan salah satu AJI Kota yang berada di Indonesia. AJI Semarang berawal dari berdirinya Forum Jurnalis Semarang di akhir Mei 1998. Sebuah forum yang berupaya melawan keresahan atas merosotnya marwah profesi jurnalis yang ternodai oleh praktik jurnalistik kotor. Forum Jurnalis Semarang bersifat cair, tanpa truktur organisasi yang rigid. Untuk menjalankan roda organisasi hanya ditunjuk pengurus inti: Arif A. Kuswardono (*Forum Keadilan*) sebagai koordinator, Adi Prinantyo (*Suara Medeka*) sebagai wakil koordinator, serta dua sekretaris yakni Resi Fajar Himawanti (*Suara Pembaruan*) dan Ganug Nugroho Adi (*Suara Merdeka*). Sebagai organisasi yang lahir dari rahim reformasi, Forum Jurnalis Semarang aktif membangun konsolidasi dengan berbagai elemen pro demokrasi seperti aktivis mahasiswa, akademisi, budayawan, seniman, serta kekuatan-keuatan lain penyokong reformasi 1998. Sayangnya, pada perjalanannya, Forum Jurnalis Semarang tak berjalan lama seiring hijrahnya Arif serta beberapa jurnalis

lain yang pindah kota mengikuti tugas dari media tempatnya bekerja. Akhirnya, sebagian pegiat Forum Jurnalis Semarang dengan didukung elemen reformis yang lain sepakat mendeklarasikan pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang. Dengan Adi Prinantyo yang ditunjuk sebagai Ketua AJI Semarang yang pertama.

AJI Semarang di deklarasikan pada 10 Juli 1998. Pendeklarasiannya ditandai dengan seminar kebebasan pers di era reformasi bertempat di Hotel Graha Santika Semarang. Hadir sebagai pembicara adalah jurnalis senior Atmakusuma Astraatmadja, Ketua AJI Indonesia Lukas Luwarso serta Budayawan yang juga kolomnis Universitas Diponegoro, Darmanto Jatman. Kelahiran AJI Semarang diawali dari serangkaian obrolan dan diskusi sejumlah jurnalis dan elemen pro demokrasi yang peduli kebebasan pers dan kemerdekaan berekspresi.

Pada perkembangannya, ketika pengurus AJI Semarang mempertegas nilai-nilai yang harus diperjuangkan terutama anti amplop, maka terjadilah seleksi alam. Sebagian jurnalis tak lagi aktif. Ada yang berterus terang keluar dari AJI karena belum bisa menolak amplop. Ia berdalih, pemberian dari narasumber bisa menutupi minimnya upah yang diterima dari perusahaan. Namun, tak sedikit anggota yang menghilang tanpa pernyataan.

Resistensi dari industri makin menjadi ketika AJI getol memperjuangkan berdirinya serikat pekerja jurnalis di masing-masing industri media. Pemahaman yang keliru atas pentingnya serikat pekerja jurnalis memunculkan anggapan, kehadiran AJI hanya akan menimbulkan “gejolak” hubungan industrial. Pada

akhirnya, bergabung dengan AJI adalah sebuah pilihan sikap. Sebuah ketegasan untuk menjaga marwah jurnalisisme yang independen dan anti suap. Rendahnya upah jurnalis bukan hambatan untuk independen, melainkan sebagai tantangan. Dengan kondisi demikian, strategi pengembangan keanggotaan AJI Semarang adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Biarlah anggota sedikit tapi taat kode etik.

Dalam perjalanan sejarahnya hingga saat ini, AJI Semarang konsisten memperjuangkan penegakan kode etik jurnalistik yang di dalamnya terdapat nilai kebebasan pers, independensi pers, profesionalisme dan antisuap. Juga menyuarakan pendirian serikat pekerja pers dan peningkatan kesejahteraan jurnalis. Selama 16 tahun berdiri (1998-2014), AJI Semarang terlibat aktif dalam kegiatan, baik yang berhubungan langsung dengan isu-isu jurnalisisme, maupun isu-isu pro demokrasi yang diselenggarakan bersama kelompok jaringan. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki Aliansi Jurnalis Independen wilayah Semarang periode 2016-2019 :

Majelis Etik	: Tubagus Swarajati (Budayawan) Wisnu Tanggoro (Akademisi Satya Wacana) Triyono Lukmantoro (Akademisi Undip)
Dewan Pertimbangan Organisasi	: Ardiansyah Harjunantyo (Metrotv) Antok Prabowo (Suara Merdeka)
Badan Pemeriksa Keuangan	: Herdjoko (Jakarta Pos)
Ketua	: Edi Faisol (Tempo)
Sekretaris	: Heri CS (Radio Idola FM)

Bendahara	: Gregorius (Kompas)
Divisi Advokasi	: Aris Mulyawan (Suara Merdeka) Girindra (iNewstv) dan Tomi (Freeland)
Divisi Program	: Pratono (Radar)
Divisi Perempuan	: Fitria rachmawati (Tempo)
Divisi Komunikasi dan Informasi	: Abdul Arif (Berita gar)
Divisi dana dan usaha	: Muhammad Hamdi (Freeland)

Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Karena itulah, AJI secara rutin melaksanakan sejumlah kegiatan kampanye, advokasi, training, workshop, diskusi, seminar, penelitian, beasiswa, penerbitan buku, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan visi dan misi yang dimiliki oleh Aliansi Jurnalis Independen, antara lain :

1. Perjuangan untuk Mempertahankan Kebebasan Pers.

Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI hingga kini. Ancaman bagi kebebasan pers itu ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis masih relative tinggi, meski statistik jumlah kasus yang dimiliki AJI cukup fluktuatif.

Persoalan impunitas masih mendera berbagai kasus pembunuhan jurnalis. Seperti kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin wartawan Harian Bernas Yogyakarta, 1996. AJI memberikan perhatian

serius atas perkembangan tiap tahun kasus ini. Untuk menghargai dedikasinya kepada profesi, AJI menggunakan nama Udin Award sebagai penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi korban saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

2. Meningkatkan Profesionalisme

Bagi AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi. Salah satu program penting AJI yang berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak amplop atau pemberian dari nara sumber. AJI juga telah menggelar Uji Kompetensi Jurnalis yang pertama secara nasional pada Februari 2012, dan akan terus bergulir di berbagai AJI Kota.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Jurnalis

Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai sejak Kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pembentukan serikat pekerja di masing-masing media.

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota Aliansi Jurnalis Independen wajib mematuhi etika profesi yang tertuang dalam Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen sebagai berikut :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.
4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.
10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.

11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak menjiplak.
15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya.
16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.
20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.
21. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

4.2 Kontrol Informasi Publik terhadap *Fake News* dan *Hate Speech*

Fake news dan *hate speech* merupakan fenomena yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena ini mayoritas penyebarannya terletak pada platform media online seperti website, blog, portal berita yang tidak terverifikasi dan media sosial. Fenomena yang kerap ditandai sebagai akibat dari penyimpangan informasi dalam perkembangan teknologi ini merupakan tantangan bagi setiap elemen di masyarakat. Kedua fenomena ini berakar dari informasi yang salah dan faktor kesengajaan untuk mendorong suatu kepentingan terselubung.

Berbagai upaya dan solusi telah ditawarkan untuk mengatasi adanya fenomena yang kerap menjadi pemicu adanya kepentingan tertentu dari sebuah kelompok. Dampaknya sangat luas bagi masyarakat awam yang tidak memiliki bekal kompetensi literasi. Penyebaran informasi yang belum tentu ada kebenarannya ini dapat memunculkan ujaran kebencian atau biasa disebut *hate speech*. *Fake news* dan *hate speech* tidak jarang digunakan sebagai ujung tombak propaganda dengan tujuan menggiring opini dalam memenuhi tujuan suatu kelompok yang berkepentingan. Beberapa lembaga sangat diharapkan dapat berperan dalam melawan adanya *fake news* dan *hate speech* tersebut. Penyebaran yang tidak dapat di kontrol seringkali menimbulkan mispersepsi di kalangan masyarakat awam.

Pers yang dikenal sebagai pilar ke 4 dalam demokrasi memiliki andil dalam memerangi fenomena yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang ditegakkan. Penanganan *fake news* dan *hate speech* merupakan

tugas bersama. Baik dari peran Pemerintah, Kementerian dan lembaga yang bersangkutan seperti Badan Cyber Nasional, Dewan Pers dan tentunya masyarakat. Maka dari itu, kerjasama dari berbagai elemen sangat penting dalam menangani fenomena yang sering dijadikan sebagai alat propaganda ditengah kemajuan era digital masa kini. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Pembekalan kompetensi yang diperoleh salah satunya dari organisasi pers. Jurnalis sebagai profesi yang memegang teguh prinsip dan kaidah jurnalistik menjadi salah satu peluang dalam melawan kedua fenomena tersebut. Organisasi pers sebagai wadah bagi profesi jurnalis memiliki tugas menjaga dan mewujudkan visi misi dalam pengembangan profesionalisme dan sumber daya manusia melalui program, pelatihan serta pengadaan kerjasama. Dengan demikian, organisasi pers selaku organisasi pers jurnalis seharusnya memiliki peran dalam menciptakan kontrol informasi terhadap fenomena *fake news* dan *hate speech*.

Kontrol informasi ini dijelaskan sebagai bentuk pengendalian dari sebuah informasi yang lahir dari berbagai sudut pandang dan pemikiran yang difasilitasi oleh kemudahan media online dan sangat mempengaruhi arus informasi yang berkembang di publik. Perkembangan informasi yang sangat luas dan diberikannya kebebasan berekspresi di dalam ruang publik tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya sebuah kendali. Maka dari itu kontrol informasi yang berkembang di publik ini sangat diperlukan untuk melawan fenomena penyimpangan informasi ini melalui peran serta pekerja media yang memiliki kredibilitas tinggi terkait pengelolaan informasi.

4.3 Profil Informan

4.3.1 Jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen wilayah Semarang

Jurnalis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan pertama. Beliau merupakan jurnalis yang sudah lama sejak tahun 2014 memutuskan untuk bergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen Semarang. Beliau terbilang sebagai jurnalis muda di dalam sertifikasi profesinya. Beliau lahir di Kudus pada bulan mei 1989. Sejak bergabung dalam keanggotaan AJI Semarang beliau ditempatkan pada Divisi Informasi dan Komunikasi. Tugas utama beliau adalah mengelola situs berita rintisan Aliansi Jurnalis Independen Semarang yaitu Serat.id. Beliau tergabung dalam media “beritagar.id”. Beliau juga pernah bergabung dalam Harian Tribun Jateng pada tahun 2013-2015.

Selain melaksanakan tugas utamanya sebagai seorang Jurnalis dan anggota organisasi pers, beliau memiliki kesibukan sebagai kartunis. Karyanya sering dipamerkan di beberapa negara diantaranya, China, Filiphina, Turki, Korea, Tunisia, Jerman, Luksemburg, Norwegia dan Mesir. Beliau juga pernah memenangkan kontes kartun international. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua *Gold Pencil* Indonesia (Lembaga Pengembangan dan Kajian Kartun). Dalam kesibukannya di AJI beliau seringkali menjadi pembicara dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh organisasi eksternal untuk mengisi materi mengenai verifikasi data atau *fact checking* informasi. Baru-baru ini beliau menjadi pemateri dalam pelatihan verifikasi data di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang diikuti oleh setiap perwakilan dari setiap daerah di Jawa Tengah. Diluar

organisasi, beliau juga sering diundang sebagai pemateri di kalangan Mahasiswa baik acara formal maupun informal. Beliau merupakan salah satu peserta dari *Google News Lab Training* yang merupakan program dari AJI Indonesia yang kemudian di breakdown ke setiap AJI daerah termasuk Semarang untuk melawan mis dan disinformasi atau masyarakat sering menyebutnya dengan hoaks. Selama waktu senggangnya dia memilih untuk menulis di sebuah blog atau portal pribadinya.

4.3.2 Kepala Aliansi Jurnalis Independen wilayah Semarang

Kepala Aliansi Jurnalis Independen wilayah Semarang dalam penelitian ini adalah Informan kedua. Beliau mulai menjabat sebagai ketua AJI Semarang sejak tahun 2016. Pemegang kebijakan teratas di AJI Semarang ini merupakan salah satu Jurnalis dari media ternama yaitu Tempo. Beliau tergabung di Tempo sejak tahun 2008. Sudah tidak asing lagi bagi kalangan Pers mahasiswa Semarang ketika beliau diminta untuk membagikan ilmunya dalam pelatihan serta seminar kejournalistikan. Ketua AJI Semarang ini sering menulis dalam harian tempo, majalah tempo, dan *tempo.co*. Selain itu beliau memiliki berbagai karya jurnalistik yang lolos beasiswa liputan. Dan beliau juga menjadi seorang redaktur dan pendidik jarak jauh tabloidjubi.com yang berbasis di Papua.

4.3.3 Trainer Program *Google News Lab Training Initiative*

Aliansi Jurnalis Indonesia

Tentor Program *Google News Lab Training Initiative* Aliansi Jurnalis Indonesia adalah informan ketiga. Beliau merupakan trainer dari program khusus AJI yang ditujukan dalam pembekalan kompetensi jurnalis anggotanya untuk melawan mis dan disinformasi atau hoaks. *Trainer* dalam program ini memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Google selaku lembaga yang bekerjasama dalam mengukung program khusus hoaks ini. Semua *trainer* dalam program ini berasal dari AJI Indonesia yang berlisensi google. Beliau berasal dari Aliansi Jurnalis Independen wilayah Solo.

Tugas trainer di program ini adalah mengajarkan bagaimana cara mengidentifikasi informasi, mengevaluasi informasi dan mengajari teknik verifikasi informasi dan data dalam pemberitaan. Yang kemudian akan diajarkan pada setiap jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikembangkan ke lintas organisasi dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan trainer profesional dalam identifikasi mis dan disinformasi untuk dapat mengajarkan dan memberi pembekalan kompetensi pada jurnalis-jurnalis di setiap daerah agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar serta dapat menularkan ilmunya pada masyarakat disetiap pelatihan atau seminar yang diadakan.

4.3.4 Pengelola Program *Google News Lab Training Initiative*

Aliansi Jurnalis Indonesia

Pengelola Program *Google News Lab Training Initiative* Aliansi Jurnalis Indonesia adalah informan keempat. Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan menjadi pengelola Program *Google News Lab Training*. Beliau pernah menjadi koordinator di Tempo Institute dalam Program pelatihan dan pendidikan Jurnalistik. Sebelum bergabung di AJI Indonesia beliau merupakan reporter koran dan majalah TEMPO. Kemudian menjadi Editor di *Independen.id*, *EnergiView Magazine* dan masih banyak lagi.

Beliau merupakan satu dari beberapa pengelola Program yang ditujukan khusus dalam mengkampanyekan perlawanan terhadap hoaks, *fake news*, *false news* dan jenis-jenis misinformasi dan disinformasi tersebut. Beliau bertugas untuk mengelola dan membreakdown program tersebut ke berbagai daerah dan bekerjasama dengan AJI setiap daerah untuk membentuk *trainer* atau *fact checker* yang kemudian dapat mengedukasi lintas organisasi dari komunitas lokal, mahasiswa, akademisi, aktivis dan masyarakat terkait penanganan terhadap misinformasi dan disinformasi yang sedang berkembang.